

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### **1.1. Latar Belakang**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar murid secara aktif dapat mengembangkan potensi pada dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Maka dari itu, negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakatnya semakin baik. Kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Salah satu bentuk janji pemerintah itu tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar dan menjalankan seluruh proses pendidikan dengan transparan dan akuntabel yang harus dikelola dengan baik dan bertanggungjawab guna menjaga kepercayaan publik. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2

menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh murid pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lainnya.

Mengingat sangat pentingnya pendidikan, maka seluruh komponen pendidikan seperti kurikulum, guru, murid, sarana sekolah dan fasilitas sekolah menjadi sangat strategis dalam peningkatan mutu pendidikan. Mengenai masalah mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai *input*, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Untuk menjalankan pendidikan dengan berbagai komponen tersebut dibutuhkan manajemen sebagai pengarah sekaligus penggerak dalam menjalankan pendidikan. Sementara mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai atau hasil yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan akan meningkat, jika dalam proses pembelajaran didukung dengan guru yang berkualitas, serta ditunjang berbagai sarana prasarana pendidikan. Maka dari itu, terwujudnya kompetensi murid juga tidak lepas dari besarnya anggaran pendidikan yang tersedia.

Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan (BOSP) pada dasarnya merupakan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk membantu biaya pendidikan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas

pendidikan serta peningkatan mutu. Dana BOSP diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu. Kehadiran dana BOSP diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua murid, dan bahkan jika dimungkinkan agar murid miskin dapat mendapatkan pendidikan secara gratis atau setidaknya dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan dasar.

Adanya program dana BOSP menuntut setiap sekolah agar dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan biaya-biaya pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan pendanaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap mutu pendidikan sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Pengelolaan dana BOSP haruslah disesuaikan dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepala sekolah selaku penanggung jawab pengelolaan dana BOSP di sekolah mempunyai peran yang besar untuk mengatur alokasi pendanaan untuk operasional sekolah.

Adanya kebijakan pemerintah melalui penyaluran dana BOSP bukan berarti berhentinya permasalahan pada pendidikan, namun memunculkan masalah baru terkait dengan penyelewengan, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOSP. Berkaitan dengan ketidakefektifan penggunaan dana BOSP, hasil penelitian Fitri (2014) menunjukkan bahwa masih ada juga sekolah yang kurang transparansi dan tidak melibatkan komite sekolah dalam merencanakan penggunaan dana BOSP, masih ada sekolah yang menggunakan dana BOSP tidak sesuai dengan rencana penggunaan dana BOSP, audit Bawasda menemukan bahwa banyak sekolah yang menggunakan dana BOSP tidak sesuai dengan pengeluaran, berdasarkan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa sekolah yang laporan pertanggung jawaban dana BOSP ditolak dan dikembalikan, hal ini disebabkan oleh sistem pelaporannya yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Untuk menghindari ketidakefektifan penggunaan dana BOSP, maka diperlukan adanya kemampuan dari kepala sekolah sebagai manajer dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah membutuhkan manajemen keuangan, karena merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 48 yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

Proses manajemen BOSP di sekolah meliputi perencanaan dalam hal pendanaan disebut Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), perencanaan yang telah disusun dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi. Penyusunan alokasi anggaran memang menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana BOSP diperlukan laporan administrasi keuangan. Perwujudan dari manajemen adalah pengelolaan dana BOSP agar efektif, efisien, akuntabel dan transparan.

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pasuruan tidak semua dijadikan sebagai subyek penelitian. Dalam penelitian ini hanya diambil dua Sekolah yaitu UPT Satuan Pendidikan SDN Asemkandang dan UPT Satuan Pendidikan SDN Klampisrejo. Pemilihan lokasi penelitian ini karena kedua sekolah tersebut merupakan penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP). Selain itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada tanggal 3 Desember 2024, menunjukkan bahwa pihak sekolah membuat skala prioritas dalam mengalokasikan dana program BOSP yaitu: 1) peningkatan sarana belajar melalui pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk di koleksi di perpustakaan, 2) pendanaan kegiatan belajar mengajar melalui pendanaan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan

semester, ujian sekolah, analisis, remedial dan pengayaan, dan laporan hasil belajar murid, 3) pendanaan aktivitas ke murid dan seperti program kegiatan ekstrakurikuler yaitu olah raga, kesenian, keagamaan/rohis, dan lain-lain. Berdasarkan kebijakan alokasi program dana BOSP tersebut, kegiatan belajar dan mengajar di kedua Sekolah Menengah Pertama tersebut dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul:

**“Manajemen Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Multi Situs di SDN Asemkandang dan SDN Klampisrejo Kabupaten Pasuruan)**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Asemkandang dan SDN Klampisrejo?
2. Bagaimana Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Klampisrejo?
3. Faktor - faktor Manajemen Dana Bantuan Operasional untuk meningkatkan Mutu Pendidikan di SDN Asemkandang dan SDN Klampisrejo?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk meningkatkan mutu pendidikan di UPT Satuan Pendidikan SDN Asemkandang dan UPT Satuan Pendidikan SDN Klampisrejo.

2. Mendeskripsikan faktor-faktor pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan di UPT Satuan Pendidikan SDN Asemkandang dan UPT Satuan Pendidikan SDN Klampisrejo.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi SDN UPT Satuan Pendidikan SDN Asemkandang dan UPT Satuan Pendidikan SDN Klampisrejo.
  - a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam merumuskan kebijakan dan keputusan terkait program sekolah untuk mutu pendidikan
  - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program prioritas.
2. Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Pasuruan
3. Komite Sekolah
  - a. Sebagai informasi mengenai penggunaan dan pengelolaan dana BOSP
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan
  - a. Sebagai masukan dalam mengelola pembagian BOSP lebih adil dan bijaksana
5. Peneliti berikutnya
  - a. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan informasi tentang manajemen dana BOSP dalam meningkatkan mutu pendidikan.

#### **1.5 Definisi Operasional**

Pengelolaan Dana BOSP dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan membutuhkan manajemen yang efektif dan transparan. Agar dalam mendeskripsikan penelitian ini jelas sehingga tidak rancu, maka peneliti perlu untuk memaparkan secara singkat masing - masing definisi beberapa kata dan atau frase dalam judul proposal tesis ini, Adapun definisi

operasional yang akan peneliti jelaskan adalah sebagai berikut:

### **1. Manajemen**

Manajemen dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (baik manusia, uang, maupun material) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, serta pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Terkait dengan manajemen dana BOSP, maka dalam hal ini seorang manajer beserta guru dan tendik perlu untuk melakukan proses perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOSP dengan baik dan benar agar terjadi peningkatan mutu Pendidikan di Lembaga yang dipimpin, yakni di UPT Satuan Pendidikan SDN Asemkandang dan UPT Satuan Pendidikan SDN Klampisrejo.

### **2. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)**

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP dapat didefinisikan sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah untuk mendukung kegiatan operasional dan meningkatkan mutu pendidikan. Bantuan ini biasanya digunakan untuk biaya yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, seperti; pembelian buku, alat tulis, perawatan sarana dan prasarana sekolah, serta biaya kegiatan lain yang mendukung kelancaran proses pendidikan. BOSP bertujuan untuk meringankan beban sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan sumber daya terbatas.

### **3. Mutu Pendidikan**

Mutu Pendidikan adalah tingkat kualitas pendidikan yang dihasilkan, mencakup berbagai aspek seperti proses pembelajaran, hasil belajar, fasilitas, tenaga pendidik, dan sistem

pendidikan secara keseluruhan. Tentunya, dengan lancarnya alokasi dana BOSP serta pengelolaan yang efektif dan transparan, maka mutu Pendidikan akan menjadi baik pula.